

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenannyalah kami dapat menyelesaikan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2025 pada unit organisasi Kantor Kecamatan Siantan Tengah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah merupakan bentuk pertanggung jawaban dari salah satu tugas dan Kewajiban Camat dalam melaksanakan seluruh program kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan batasan kewenangan yang telah dilimpahkan (didelegasikan) oleh Bupati kepada Camat dan tugas serta fungsi Kecamatan sebagai lembaga teknis kewilayahan unsur pendukung pelaksana kebijakan pemerintah daerah yang bersifat spesifik dan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah, diantaranya mensukseskan implementasi visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi program prioritas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kami menyadari bahwa penyampaian dan pemaparan materi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini masih belum sempurna, sehingga saran pendapat yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan.

Terakhir kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya LKIP ini.

Air Asuk, 1 November 2025

Camat Siantan Tengah,



Firdaus S. Sos

Penata Tingkat I (III.d)

NIP 19870207201011004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum.....	1
A. Kondisi Umum Kecamatan	2
a. Kondisi Eksistening Kecamatan Siantan Tengah	3
b. Kondisi Sosil Politik.....	3
b.1 Pendidikan	3
b.2 Kondisi Perekonomian Masyarakat.....	4
A. <i>2 Struktur Organisasi</i>	5
A.3 TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT	6
A.4 Sumber Daya Aparatur Kecamatan.....	8
B . PERMASALAHAN UTAMA/ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	9
C . Dasar Hukum	10
D . Sitem Penyajian.....	10
BAB II.....	11
PERENCANAAN KINERJA	12
A. Rencana Strategis	12
2.1. Perencanaan Strategis.....	12
2.2 Tujuan Sasaran, Strategi dan Arahan Kebijakan	15
2.3 Perjanjian Kinerja 2025	16
BAB III	18
AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
A. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	19
B. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	19
BAB IV	29
PENUTUP	30

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	3
Tabel 1.2	3
Tabel 1.3	9
Tabel 1.4	9
Tabel 2.1	13
Tabel 2.2	14
Tabel 2.3	15
Tabel 2.4	16
Tabel 2.5	17
Tabel 3.1.1	20
Tabel 3.1.2	21
Tabel 3.1.3	22
Tabel 3.1.4	22
Tabel 3.1.5	22
Tabel 3.1.6	23
Tabel 3.1.7	23
Tabel 3.1.8	24
Tabel 3.1.9	24
Tabel 3.1.10.....	25
Tabel 3.1.11.....	26
Tabel 3.1.12.....	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Siantan Tengah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2016 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

A. Kondisi Umum Kecamatan

a) Kondisi Eksistening Kecamatan Siantan Tengah

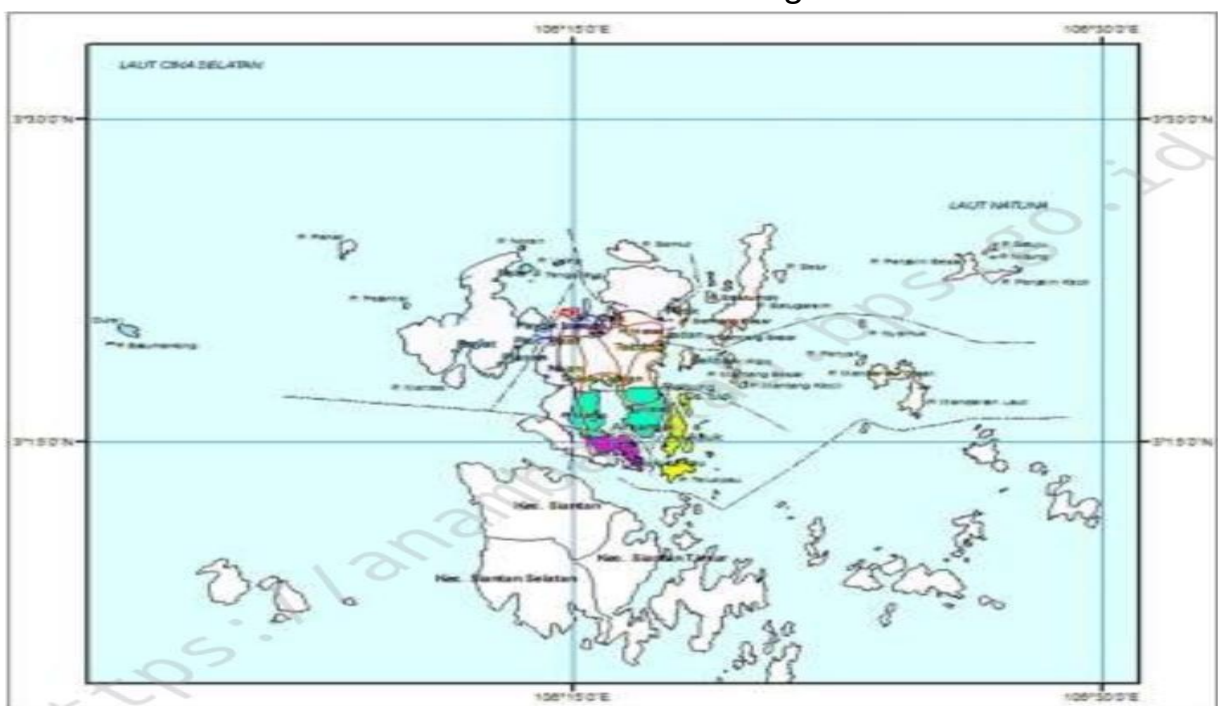
Kecamatan Siantan Tengah adalah salah satu kecamatan yang terletak di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas, letak geografis Kecamatan Siantan Tengah $3^{\circ}12'00''$ - $3^{\circ}17'27''$ Lintang Utara - $106^{\circ}15'00''$ - $106^{\circ}19'15''$ Bujur Timur.

Adapun batas wilayah Kecamatan Siantan Tengah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Siantan Tengah
- Sebelah Selatan : Palmatak
- Sebelah Barat : Siantan
- Sebelah Timur : Laut Kepulauan Anambas

Gambar 1.1

Peta Kecamatan Siantan Tengah



Dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan dan dalam memberikan Pelayanan Publik di Kecamatan Siantan Tengah di dukung oleh 6 (Enam) Desa.

Jumlah Pemerintah Kecamatan Siantan Tengah

Tabel 1.1

JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN SIANTAN TENGAH

No	Desa	Jumlah Penduduk
1	Air Asuk	953
2	Air Sena	804
3	Teluk Siantan	860
4	Teluk Sunting	417
5	Liuk	271
6	Lidi	328
Jumlah		3,633

b. Kondisi Sosial Politik

b.1 Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Siantan Tengah, mulai dari TK, Paud, SD sampai SMA, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.2

SARANA PENDIDIKAN DI KECAMATAN SIANTAN TENGAH

NO	DESA	NAMA SEKOLAH				JUMLAH
		TK	SD	SMP	SMK	
1	Air Asuk	√	√	√	√	4
2	Air Sena	√	√	-	-	2
3	Teluk Siantan	√	√	√	-	3
4	Teluk Sunting	√	√	-	-	2
5	Liuk	√	√	-	-	2
6	Lidi	√	√	-	-	2
Jumlah		6	6	2	1	15

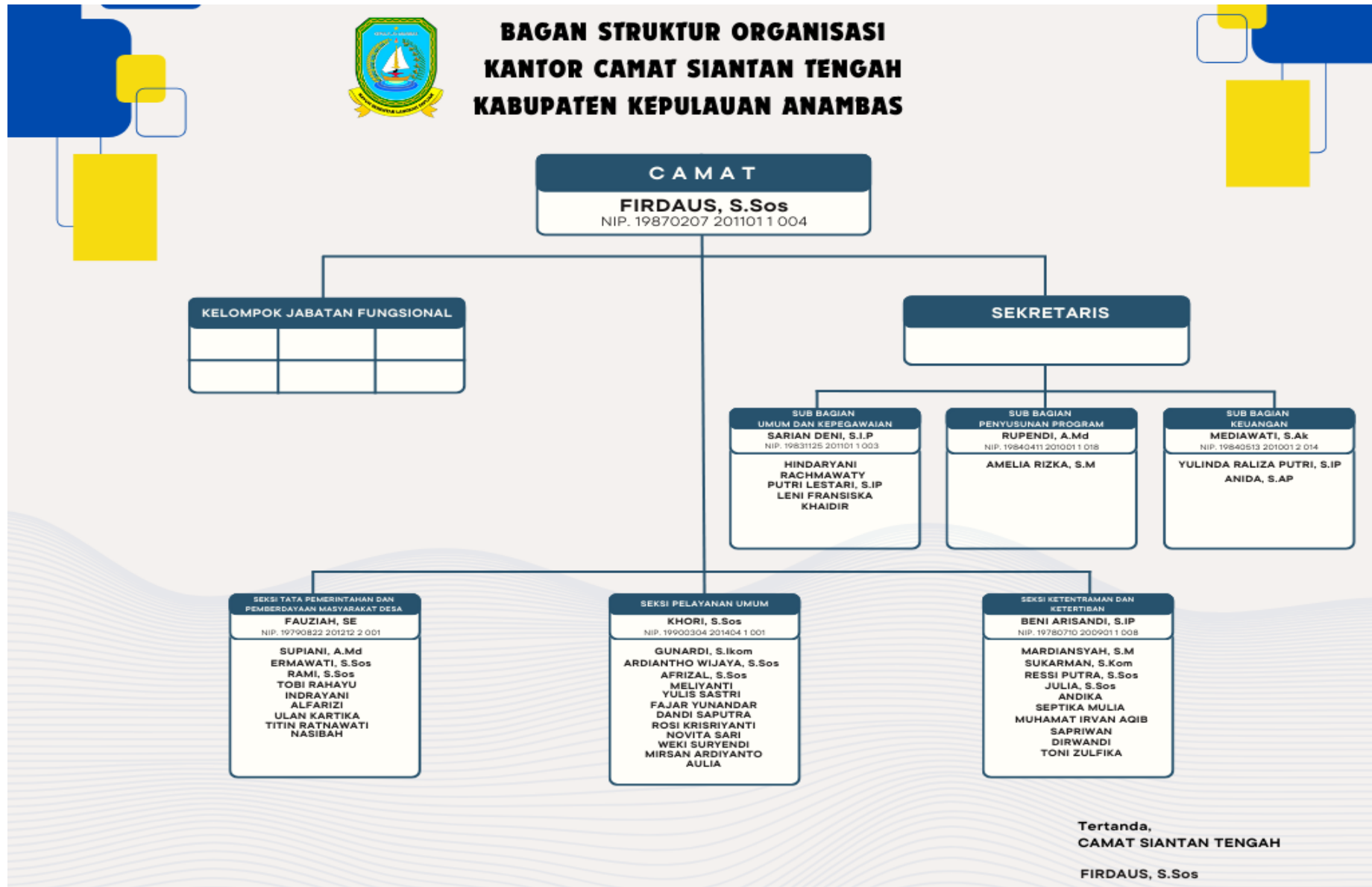
b.2 Kondisi Perekonomian Masyarakat

Kondisi sarana pendukung perekonomian masyarakat di Kecamatan Siantan Tengah sampai saat ini masih dalam tahap perkembangan sehingga masih sangat diperlukan pembinaan dan pemberian modal dari pihak terkait, adapun sarana perekonomian masyarakat sebagai berikut :

- Pertanian
- Peternakan
- Perdagangan Konsumsi dan Akomodasi
- Kerajinan Rumah Tangga
- Industri

2. Struktur Organisasi

Gambar 1.2
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan



A.3 TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT

Susunan Organisasi Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, susunan Organisasi Kecamatan Siantan Tengah terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan
- c. SUB BAG Umum dan Kepegawaian
- d. SUB BAG Program dan Keuangan
- e. KASI Pemerintahan
- f. KASI Pemberdayaan Masyarakat
- g. KASI Ketentraman dan ketertiban

Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Siantan Tengah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
- b. Penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
- c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
- d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan;

Sedangkan uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagai berikut:

A.4 Sumber Daya Aparatur Kecamatan Siantan Tengah

NO	NAMA PNS/CPNS	NIP	PANGKAT		JABATAN		PENDIDIKAN	
			GOL. RUANG	TMT	NAMA	TMT	TINGKAT IJAZAH	JURUSAN
1	FIRDAUS, S.Sos	198702072011011004	III.d	01-04-2022	Camat	26-01-2026	S1	Ilmu Administrasi Negara
2	KHORI, S.Sos	199003042014041001	III.d	01-04-2024	Kasi Pelayanan Umum	08-01-2019	S1	Ilmu Administrasi Negara
3	BENI ARISANDI, S.IP	197807102009011008	III.d	01-04-2025	Kasi. Tantrib	07-01-2020	S1	Manajemen
4	FAUZIAH, SE	197908222012122001	III.d	01-04-2025	Kasi. Tapem dan PMD	07-01-2020	S1	Manajemen
5	MEDIA WATI, S.Akun	198405132010012000	III.c	01-04-2025	Kasubbag. Keuangan	07-01-2020	S1	Akuntansi
6	RUPENDI, A.Md	198404112010011018	III.c	01-04-2025	Kasubbag. Penyusun Program	07-01-2020	DIII	Manajemen Pemerintahan
7	SUPIANI, S.Ak	198607182011012007	III.b	29-01-2024	Penelaah Teknis Kebijakan	02-04-2025	S1	Akuntansi
8	SARIAN DENI, S.IP	198311252011011003	III.a	01-04-2025	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	26-01-2026	S1	Ilmu Pemerintahan
9	YULINDA RALIZA PUTRI, S.I.P	19880717 011012005	III.a	01-04-2025	Penelaah Teknis Kebijakan Sub. Bagian Keuangan	16-07-2020	S1	Ilmu Pemerintahan

NO	NAMA PPPK	NIPPPK	JABATAN			PENDIDIKAN
			NAMA	TMT	TINGKAT IJAZAH	JURUSAN
1	GUNARDI, S.Ikom	199207012025211017	Penata Layanan Operasional	07-05-2025	S1	Ilmu Komunikasi
2	SUKARMAN, S.Kom	199108012025211033	Penata Layanan Operasional	07-05-2025	S1	Sistem Informasi
3	ANIDA, S.AP	199305092025212024	Penata Layanan Operasional	07-05-2025	S1	Administrasi Negara
4	ERMAWATI, S.Sos	199206102025212043	Penata Layanan Operasional	07-05-2025	S1	Sosiologi
5	RAMI, S.Sos	199006132025212027	Penata Layanan Operasional	07-05-2025	S1	Sosiologi
6	ARDIANTHO WIJAYA, S.Sos	199110312025211017	Penata Layanan Operasional	07-05-2025	S1	Sosiologi
7	MARDIANSYAH, S.M	199503232025211031	Penata Layanan Operasional	07-05-2025	S1	Manajemen
8	RESSI PUTRA, S.Sos	198902222025211016	Penata Layanan Operasional	07-05-2025	S1	Sosiologi
9	JULIA, S.Sos	198602012025212022	Penata Layanan Operasional	07-05-2025	S1	Ilmu Komunikasi
10	AFRIZAL, S.Sos	199804102025211021	Penata Layanan Operasional	28-10-2025	S1	Sosiologi
11	PUTRI LESTARI, S.I.P	199810162025212037	Penata Layanan Operasional	28-10-2025	S1	Ilmu Pemerintahan
12	AMELIA RIZKA, S.M	199903102025212024	Penata Layanan Operasional	28-10-2025	S1	Manajemen
13	SEPTIKA MULIA	199609072025212019	Pengadministrasi Perkantoran	07-05-2025	SMA	Ilmu Pengetahuan Sosial
14	ANDIKA	199701072025211015	Staf Ketentraman dan ketertiban	07-05-2025	SMK	Perkantoran
15	TOBI RAHAYU	199807202025211019	Operator Layanan Operasional	07-05-2025	SMK	Perikanan

16	TITIN RATNAWTI	200210192025212004	Operator Layanan Operasional	28-10-2025	SMK	Akuntansi
17	LENI FRANSISKA	200407132025212001	Pengadministrasi Perkantoran	28-10-2025	SMK	Perhotelan
18	ALFARIZI	199804222025211018	Operator Layanan Operasional	28-10-2025	SMK	Perkantoran
19	ULAN KARTIKA	200204052025212003	Operator Layanan Operasional	28-10-2025	SMK	Akuntansi
20	MUHAMAT IRVAN AQIB	200006162025211020	Operator Layanan Operasional	28-10-2025	SMK	Perkantoran
21	TONI ZULFIKA	199104282025211053	Operator Layanan Operasional	28-10-2025	SMK	Perkantoran
22	SAPRIWAN	199407092025211041	Operator Layanan Operasional	28-10-2025	SMK	Perkantoran
23	DIRWANDI	198607282025211042	Operator Layanan Operasional	28-10-2025	Paket C	Ilmu Pengetahuan Sosial
24	RACHMAWATY	197808252025212003	Pengadministrasi Perkantoran	07-05-2025	SMA	Ilmu Pengetahuan Sosial
25	NOVITA SARI	199305292025212044	Pengadministrasi Perkantoran	28-10-2025	SMK	Pariwisata
26	MIRSAN ARDIYANTO	199901212025211017	Pengadministrasi Perkantoran	28-10-2025	SMK	Perkantoran
27	WEKI SURYENDI	199810052025211024	Pengadministrasi Perkantoran	28-10-2025	SMK	Perkantoran
28	AULIA	200107122025212014	Pengadministrasi Perkantoran	28-10-2025	Paket C	Ilmu Pengetahuan Sosial
29	MELIYANTI	199212032025212049	Operator Layanan Operasional	28-10-2025	SMK	Perkantoran
30	ROSI KRISRIYANTI	200211062025212001	Operator Layanan Operasional	28-10-2025	SMA	Ilmu Pengetahuan Alam
31	HINDARYANI	197406242025212009	Pengadministrasi Perkantoran	07-05-2025	Paket C	Ilmu Pengetahuan Sosial
32	INDRAYANI	198305302025212005	Operator Layanan Operasional	07-05-2025	SMA	Ilmu Pengetahuan Sosial
33	FAJAR YUNANDAR	199808192025211026	Operator Layanan Operasional	28-10-2025	SMK	Perkantoran
34	YULIS SASTRI	200405052025212001	Operator Layanan Operasional	28-10-2025	Paket C	Ilmu Pengetahuan Sosial
35	DANDI SAPUTRA	200302022025211002	Operator Layanan Operasional	28-10-2025	SMK	Perkantoran
36	NASIBAH	197603062025212020	Pengadministrasi Perkantoran	28-10-2025	SMA	Ilmu Pengetahuan Sosial
37	KHAIDIR	197410282025211026	Pengelola Umum Operasional	28-10-2025	SD	-

Table 1.3
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	PPPK	JML
1	Kecamatan Siantan Tengah	-	-	1	6	37	44
	Jumlah	-	-	1	6	37	44

Table 1.4
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan

No	Uraian	S3	S2	S1	DV	D3	SMA	SMP	SD	JML
1	Kecamatan Siantan Tengah	-	-	20	-	1	24	-	1	46
	Jumlah	-	-	20	-	1	24	-	1	46

B . PERMASALAHAN UTAMA/ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Faktor kelemahan yang perlu ditingkatkan pada lingkungan internal Kecamatan Siantan Tengah adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat dalam Perencanaan masih kurang maksimal;
2. Kurang maksimalnya data yang tersedia di layanan informasi;
3. Kurang terpeliharanya sarana/fasilitas umum Kecamatan;
4. Belum adanya bimtek atau pelatihan sesuai dengan jabatan;
5. Belum optimalnya kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban dilingkungan masyarakat yang kondusif.

Permasalahan utama yang ada di Kecamatan Siantan Tengah seperti diatas merupakan permasalahan masalah Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Siantan Tengah Masih Kurangan baik dari kemampuan karyawan itu sendiri sehingga masih terdapatnya kekurangan dalam hal pemberian pelayanan.

C . Dasar Hukum

LKIP Kecamatan Siantan Tengah ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor.29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi SBirokrasi Nomor.PER/.09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor.12 tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

D . Sitem Penyajian

Bab. I- Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, gambaran umum perangkat daerah permasalahan utama dan isu strategis perangkat daerah, sumber daya aparatur, dasar hukum penyusun LKIP dan sistem penyajian LKIP.

Bab II- Perencanaan Kinerja

Menjelaskan muatan Renstra 2021 - 2026 (Renstra hasil reviu) tujuan, sasaran, indikator dan target renstra selama lima tahun, lalu penjelasan target IKU lima tahun yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 2023

Bab III- Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disampaikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini

- dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV - Penutup

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023, permasalahan dan kendala secara umum yang dihadapi, upaya penyelesaiannya serta langkah, solusi dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2.1. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten kepulauan Anambas adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas. Rencana Strategis Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

Rencana Strategis Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Kecamatan Siantan Tengah tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas. Penyusunan Renstra Kecamatan Siantan Tengah telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Siantan Tengah merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Siantan Tengah dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Siantan Tengah tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Siantan Tengah dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Tabel 2.1
Tabel Tujuan, Sasaran dan Indikator

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan	Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi Indeks Kepuasan layanan Masyarakat
2	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terwujudnya Partisipasi Pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong Royong	Persentase Desa Berkembang menuju Desa Mandiri Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan

Tabel 2.2

Tabel Tujuan Sasaran dan Indikator

NO	TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel	Predikat AKIP	B	B	B	B	B
		Nilai AKIP	(60,10)	(63,15)	(67,00)	(69,00)	(71,00)
2	Meningkatnya Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	76,69 (Baik)	76,82 (Baik)	77,45 (Baik)	77,75 (Baik)	77,90 (Baik)
		Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Wilayah Kecamatan	70%	75%	80%	85%	90%

2.2 Tujuan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Salah satu Visi Misi Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing Maju dan Berahlakul Karimah (Anambas Bermadah II) dan Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi.

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Siantan Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	1. Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Kute Siantan yang baik, bersih dan akuntabel	1. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
			2. Mengoptimalkan System Pelayanan Publik	2. Peningkatan Kualitas pelayanan Publik Kecamatan Kute Siantan
2	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Terwujudnya Partisipasi Pemuda, Perempuan, dan Anak dalam Pembangunan serta Menciptakan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya, Toleran, dan Gotong Royong	1. Mengoptimalkan Tata Kelola Desa menuju Desa Mandiri	1. Peningkatan Tata Kelola Desa Menuju Desa Mandiri
			2. Mengoptimalkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelembagaan Tingkat Kecamatan	2. Peningkatan peran serta pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong Royong

2.3 Perjanjian Kinerja 2021

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja

Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	60	60
		Indeks Kepuasan layanan Masyarakat	82	82
2	Terwujudnya Partisipasi Pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong Royong	Persentase Desa Berkembang menuju Desa Mandiri	40	40
		Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kecamatan	100	100

Tabel 2.5
APBD Perubahan Tahun 2026

No	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,792,277,114	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	102,931,226	
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	14,188,000	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	83,103,221	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6,900,000	
Jumlah		3,999,399,561	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Siantan Tengah selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Siantan Tengah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kegiatan dan sub kegiatan yang ada dan di laksanakan di tahun 2022, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi dan penunjang keberhasilan nilai Sakip Kabupaten Kepulauan Anambas.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator

kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kegiatan dan sub kegiatan, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2025 hasil review dan Indikator Kinerja Utama SKPD dan indikator kinerja (out comes).

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertamakali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian indikator kinerja utama yang terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, dan didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2022 serta hasil review dan Indikator Kinerja Utama SKPD berdasarkan Keputusan Camat.

Sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Kecamatan Siantan Tengah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Siantan Tengah juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama yang jadi acuan di tahun sebelumnya, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja suatu indikator yang dilaksanakan di tahun sebelumnya, permasalahan serta isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi guna penunjang keberhasilan suatu target kinerja yang sudah di sepakati dan di tandatangani oleh pejabat di suatu pemerintahan. Hasil pengukuran atas keberhasilan dalam indikator kinerja utama yang sudah di laksanakan Kecamatan Siantan Tengah tahun 2022 dan sudah di ukur sesuai dengan peraturan yang berlaku menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1.1
Membandingkan antara target dan realisasi kinerja
Kecamatan Siantan Tengah Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capain
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Reformasi Birokrasi	%	60	60	71
2	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	%	82	82	89
3	Persentase Desa Berkembang Menuju Desa Mandiri	%	40	40	100
4	Meningkatkan Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100

Perbandingan antara realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dikarenakan Kecamatan Siantan Tengah tiap tahunnya mencapai realisasi yang baik.

Tabel 3.1.2

Perbandingan Antara Realisasi Serta Capaian Kinerja tahun ini dengan tahun yang lalu Kecamatan Siantan Tengah 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mewujudkan Pemerintahan Yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Tata Kelola Dan Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Indeks Reformasi Birokrasi	100%	90.70%	100%	94.36%	100%	84.90%
			Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	75%	90.70%	75%	94.36%	75%	84.90%
2		Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Wiayah Kecamatan	100%	90.70%	100%	94.36%	100%	84.90%
			Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75%	90.70%	75%	94.36%	75%	84.90%

Capaian kinerja nyata indikator Persentase yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sehingga persentase capaian kerjanya yang direncanakan tidak begitu besar di karenakan dokumen-dokumen yang tersedia masih dalam proses penyempurnaan guna pencapaian kinerja lebih baik.

Tabel 3.1.3

Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Indikator Kinerja Kecamatan

Sekretaris Kecamatan			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatkan Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang berkualitas	100%
Kasubag Program Keuangan			
NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Presentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan/Dokumen Capaian Kinerja, Keuangan Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kecamatan Siantan Tengah	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

Tabel 3.1.4

Analisis Program Kegiatan Yang Menuju Keberhasilan Tercapainya Indikator Kinerja Kecamatan

No	Program	Anggaran	Ket
1	2	3	4
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	APBD

1. Indikator 2, Persentase RPJMD dalam Kondisi Baik.

Tabel 3.15

Membandingkan antara dan Realisasi Kinerja Kecamatan Siantan Tengah Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Persentase RPJMD Dalam Kondisi Baik	%	60,10	60,10	60,10

Capaian Kinerja Utama Indikator Persentase RPJMD Dalam Kondisi baik

di rencanakan dalam Perjanjian Kerja Tahun 2025.

Tabel 3.1.6

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun inidengan Tahun yang lalu Kecamatan Siantan Tengah Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mewujudkan Pemerintahan Yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Tata Kelola Dan Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Indeks Reformasi Birokrasi	100%	90.70%	100%	94.36%	100%	84.90%
			Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	75%	90.70%	75%	94.36%	75%	84.90%
2		Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Wiayah Kecamatan	100%	90.70%	100%	94.36%	100%	84.90%
			Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75%	90.70%	75%	94.36%	75%	84.90%

Tabel 3.1.7

Membandingkan realisasi Dengan tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang terdapat Dalam Dokumen Perencanaan

No	Sasaramn Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Tahun 2023	
					Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Persentase RPJMD	%	63,00	63,00	63,00

Capaian kinerja nyata indicator Target Jangka Menengah Persentase RPJMD dalam kondisi baik.

Tabel 3.1.8

Penyebab Keberhasilan Tercapainya Indikator Kinerja Persentase RPJMD
dalam Kondi Baik

Sekretaris			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Persentase tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran	100%
Kasubag Umum dan Kepegawaian			
NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Tertib Administrasi Aset Aset	Persentase Pengelolaan Aset Bergerak dan Aset tidak bergerak	

Dari tabel diatas dapat diketahui sasaran dan indikator kinerja yang mendukung pada pencapaian sasaran organisasi untuk Persentase RPJMD dalam kondisi baik di Kecamatan Siantan Tengah tahun 2025.

Adapun Program ,kegiatan dan Anggaran yang menunjang keberhasilan dan pencapaian indikator Persentase RPJMD/Aset dalam kondisi baik tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1.9

Penyebab Keberhasilan /Kegagalan Tercapainya Indikator KinerjaPersentase RPJMD
kondisi baik

Sekretaris			
No	Program	Anggaran	Target
1	2	3	4
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/ KOTA	2,849,329,934.99	APBD
Kasubag Umum dan Kepegawaian			
NO	Sasaran Strategis	Anggaran	Target
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,596,915,528	APBD
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	109,973,902	APBD
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	APBD
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99,415,505	APBD

6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	APBD
---	---	---	------

Dari tabel diatas dapat diketahui sasaran dan indikator kinerja yang mendukung pada pencapaian sasaran organisasi untuk Persentase dalam kondisi baik di Kecamatan Siantan Tengah.

Tabel 3.1.10
Penyebab Keberhasilan Tercapainya Indikator Kinerja

No	Sasaran Startegis	Indikator Sasaran	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Tata Kelola Dan Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	- Indeks Reformasi Birokrasi	(63,15)
		- Indeks Kepuasan Masyarakat	(63,15)
2	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-Persentase Desa Berkembang menuju Desa Mandiri	(75%)
		-Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di wilayah Kecamatan	(75%)

		Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	
		Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%
Kasubag Umum dan Kepegawaian			
NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan akuntable	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%

Penyebab keberhasilan indikator dalam sekretariat karena meningkatnya kesadaran di lingkungan kecamatan Siantan Tengah tentang kedisiplinan, administrasi serta mampu bersaing di era go digital untuk peningkatan kinerja.

Tabel 3.1.11
Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan Tercapainya Indikator
Kinerja Kecamatan

Sekretaris			
No	Program	Anggaran	KET
1	2	3	4
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ kota	2,849,329,934.99	APBD
Kepala Seksi Pemerintahan			
No	Program	Anggaran	KET
1	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	23,000,000	APBD
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	20,025,000	APBD

Selama tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Siantan Tengah, adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Kecamatan Siantan Tengah pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.12

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp2,849,329,934.99	
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,641,331,809	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,470,983,528	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	125,932,000	
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	109,973,902	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,046,968	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23,099,999	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7,965,580	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4,988,355	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	31,148,000	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35,725,000	
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	
2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99,415,505	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26,452,200	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72,963,305	
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	
VIII	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	
IX	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat	20,025,000	

	Kecamatan		
1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	20,025,000	
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	-	
D	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	23,000,000	
X	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	23,000,000	
1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	23,000,000	
2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	
D	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	
XI	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	
1	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-	
2	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-	

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) perangkat daerah Kecamatan Siantan Tengah Tahun 2025, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan program Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Keberhasilan atau kegagalan Kecamatan Siantan Tengah dapat dilihat dari jumlah rencana kegiatan yang dapat direalisasikan, dimana secara umum Kecamatan Siantan Tengah telah memperlihatkan pencapaian kinerjanya yang cukup baik terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja kegiatan, disamping terdapat beberapa keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan, tidak menutup kemungkinan masih adanya berbagai kekurangan. Hal ini merupakan kendala yang harus dicari jalan keluarnya, karena sekecil apapun masalah yang dijumpai akan berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Siantan Tengah dan Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, tingkat kegagalannya tidak prinsipil atau bersifat fatal.

Adapun permasalahan - permasalahan yang dihadapi Kecamatan Siantan Tengah secara umum disebabkan oleh :

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik.
2. Masih kurangnya pelatihan terkait dengan jabatan
3. Upaya penanganan yang dilakukan SKPD saat terjadi permasalahan, yaitu :
 - a. Dilaksanakannya beberapa pelatihan/kegiatan serta pembinaan pegawai.
 - b. Penyediaan sarana dan parasarana penunjangkelancaran kegiatan pelaksanaan pemerintahan.
 - c. Rapat Koordinasi dilaksanakan setiap bulan.
 - d. Pembangunan beberapa mfasilitas kesehatan, pendidikan dan fasilitas umum.

Melihat permasalahan tersebut di atas, upaya pemecahan masalahnyadiprojektasikan untuk masa mendatang sebagai saran tindak lanjut untuk peningkatan kinerja yang akan datang, sehingga berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dapat diminimalisir. Adapun upaya pemecahannya antara lain sebagai berikut :

1. Pengadaan pelatihan jabatan;
2. Penambahan saran dan prasarana penunjang pelayanan publik;
3. Pelaksanaan pelatihan/bimtek terkait dengan tugas dan fungsi;
4. Mengupayakan secara bertahap peningkatan kualitas/kuantitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Peningkatan kemampuan penyelenggaraan prinsip - prinsip Administrasi Negara/fungsi - fungsi Manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam konteks kegiatan pelayanan kepada masyarakat.